

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KENAIKAN BBM TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU

Linda Permanasari⁽¹⁾

⁽¹⁾ Staf Pengajar Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin

Ringkasan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM dan Program kompensasi Dana BBM untuk mensejahterakan masyarakat prasejahtera dan bagaimanakah Realita program Pemerintah tentang kebijakan tersebut terhadap masyarakat nelayan khususnya masyarakat nelayan pesisir di Kecamatan Pulau Laut Utara Kotabaru.

Penelitian difokuskan pada Pendistribusian BBM, Kondisi Perekonomian, Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, antuan Langsung Tunai (BLT), Program Pembangunan daerah.

Program kompensasi penghapusan subsidi BBM (PKPS BBM) dengan anggaran yang telah ditentukan di dapat dari pengurangan subsidi BBM untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan. Untuk masyarakat nelayan terutama desa rampa dikecamatan Pulau laut Utara, untuk kesediaan listrik dan air masih belum memadai, begitu juga dengan keadaan jalan dan fasilitas untuk jalur darat dan perairan perlu ada pembenahan. Oleh karenanya perlu adanya program pemerintah didalam peningkatan sarana dan prasarana yang dirasakan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara.

Kata Kunci : Kebijakan, Kenaikan BBM

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kebijakan bidang ekonomi yang diambil pemerintah adalah adanya pengurangan dan penghapusan subsidi BBM, melihat kenyataan bahwa subsidi BBM merupakan komponen yang cukup menyerap anggaran, dengan pengurangan subsidi dapat mengurangi beban atau pengeluaran belanja negara begitu besar. Mengenai kebijakan pengurangan subsidi BBM sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah orde baru tahun 1984, dengan keputusan Presiden No. 2 tahun 1984, pemerintah secara resmi menaikkan harga jual BBM. Diberlakukan pengurangan subsidi pada awal Januari 1984, sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut : (1). Penemuan sumber-sumber baru, sehingga penggunaan BBM terus meningkat. (2). Naiknya harga pasaran dunia sesuai dengan penetapan OPEC sebagai Organisasi Negara-negara penghasil minyak. (3). Permintaan dalam negeri yang terus bertambah dan (4) ; Keterbatasan Pendapatan Pemerintah (Simanjuntak, 1984). Keadaan ini menyebabkan Pemerintah memutuskan kebijakan tentang pengurangan subsidi, untuk mengurangi beban negara sebagai alternatif kebijakan.

Bappenas (2004), bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah kea-

tas dengan prosentase sebesar 84% dan sisanya sebesar 16% saja yang dinikmati oleh kalangan masyarakat miskin. Pada dasarnya pemberian subsidi BBM oleh Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian adanya kenaikan BBM diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat termasuk nelayan. Pasalnya dana yang dipakai untuk Subsidi BBM akan disalurkan kebidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Aburizal Bakrie (2005), Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM ini justru menurunkan angka kemiskinan. Sebelum kenaikan harga BBM, angka kemiskinan mencapai 16,25% dari total penduduk. Jika harga BBM dinaikkan tanpa kompensasi subsidi, angka kemiskinan akan naik menjadi 16,43% dan dengan kompensasi harga BBM dinaikkan, justru angka kemiskinan akan turun menjadi 13,87%. terlepas dari itu, bahwa dengan adanya kenaikan dan pencabutan subsidi BBM akan memberikan dampak positif terhadap kelompok masyarakat miskin, dengan adanya pemberian dana kompensasi. Dalam tinjauan teori ekonomi mikro menurut Suhana (2005), yang disebut dengan teori pareto yaitu (1). Pareto Optimal, yakni terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok, pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain, (2). pareto non optimal yakni dalam kondisi pareto non-optimal ter-

jadinya kesejahteraan seseorang, tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain, dan (3). pareto superior. Dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang, tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Dengan berasumsi pada teori ekonomi mikro tersebut bahwa pencabutan subsidi oleh pemerintah berdampak positif bagi masyarakat miskin, termasuk masyarakat nelayan. Kesejahteraan menurut teori ekonomi mikro, terletak tidak hanya ada besarnya keuntungan yang didapat dari suatu hasil tangkapan nelayan. Tetapi juga dapat dilihat dari besarnya biaya yang harus ditanggung oleh nelayan dalam menyekolahkan anak dan besarnya biaya untuk pengobatan anggota keluarganya. Artinya jika biaya pendidikan anak dan kesehatan keluarga nelayan gratis seperti yang dijanjikan oleh pemerintah maka kesejahteraan nelayan pun akan sendirinya mengalami peningkatan. Karena dana yang tadinya digunakan untuk biaya pendidikan anak dan pengobatan keluarganya dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Pemerintah mengenai penetapan kenaikan BBM mempunyai argumen yang kuat, apalagi semenjak dikeluarkannya Keppres No. 90 tahun 2003 tentang harga BBM baru dan harga BBM tidak lagi berdasarkan pada harga pasar tetapi berdasarkan pada harga patokan. Target untuk menghapus subsidi BBM pada tahun 2004, seperti yang tertuang dalam Proenas tahun 2000 - 2004. Menurut Suhana (2005), sehubungan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Pemerintah berkeyakinan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk didalamnya adalah nelayan. Artinya di sini, Pemerintah tentunya telah memberikan jaminan kepada nelayan karena dana subsidi tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan tunai langsung yang akan diterima, dan ini akan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan. Kemudian Pemerintah melalui Menteri KP (Kelautan dan Perikanan) akan membangun 1500 SPBU di TPI-TPI nelayan kecil. Di seluruh Indonesia sehingga akan membantu dalam penyediaan supply BBM untuk para nelayan agar mudah didapat, pada kenyataan hal tersebut tidak terealisasi sebagaimana mestinya yang dijanjikan.

Kabupaten Kotabaru adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota Kabupaten ini terletak di ujung Utara Pulau Laut memiliki luas wilayah 9.422,73 km² dan berpenduduk sebanyak ± 241.959 jiwa BPS 2007, dan dengan jumlah nelayan laut sebanyak 15.961 jiwa menurut data yang diperoleh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru tahun 2007. Kemudian untuk daerah Kecamatan Pulau Laut Utara jumlah nelayan sebanyak 5523 jiwa dengan 90 % mayoritas penduduknya bermata

pencarian sebagai nelayan dari jumlah penduduk yang ada. akan tetapi ironisnya, kondisi kesejahteraan masyarakat masih rendah dan program Pemerintah tentang subsidi BBM belum memberikan perubahan yang berarti sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pemerintah, ditambah lagi biaya melaut yang semakin besar harus di tanggung nelayan. Suhana (2005), bahwa perlu perhatian Pemerintah terutama masyarakat nelayan yang pada umumnya berada di daerah pesisir yang terbebani akan biaya melaut yang membesar, ketidaksiapan nelayan untuk menyesuaikan terhadap angka kenaikan BBM dan ditambah sebagian besar tempat pendaratan ikan untuk nelayan kecil yang terbatas terutama untuk Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kenaikan BBM dan pengurangan Subsidi yang diarahkan ke sektor lain (Kesehatan, pendidikan, Pembangunan sarana dan prasarana desa dan BLT), pada kenyataannya belum terealisasi dengan baik di Kecamatan ini. Hal ini bahwa masih belum tersentuhnya secara merata program tersebut, semakin berkurangnya jumlah nelayan yang melaut dikarenakan biaya operasional yang tinggi, tangkapan yang semakin sedikit, biaya hidup yang semakin besar dan tempat pengisian SPBU yang minim, Sehingga hampir 60% nelayan berhenti melaut atau menggantungkan jala, kemudian untuk biaya hidup sehari-hari mereka harus mencari mata pencarian lain. Keadaan ini tentunya menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah. Bila keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan akan terus memperluas terjadinya kemiskinan. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sebenarnya bertujuan memberikan keberpihakan kepada masyarakat miskin justru memperbesar tingkat kesulitan perekonomian mereka, terutama masyarakat nelayan. Sehubungan dengan keadaan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan khususnya pada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru telah menjadikan keinginan dan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan kajian penelitian tentang "Kebijakan penanggulangan kenaikan BBM terhadap perekonomian masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara pada Kabupaten Kotabaru".

Permasalahan

Tim Peneliti menentukan fokus permasalahan yang berkenaan tentang Kebijakan menanggulangi Kenaikan harga BBM terhadap perekonomian masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara yang berhubungan dengan Kondisi Pendistribusian BBM, Pendidikan, Kesehatan, dan Bantuan tunai langsung (BLT) Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Tujuan Penelitian

Tujuan kajian riset yang dilakukan oleh tim Peneliti adalah untuk mengkaji fenomena Kenaikan BBM sebagai problem fundamental yang sulit dihindari dan berdampak langsung terhadap kehidupan perekonomian Nelayan. Maka dengan demikian tujuan riset adalah (1). untuk menganalisa, menggali dan menemukan formula yang perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam mengatasi kenaikan harga BBM yang pasti akan terjadi terhadap masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan (2). Untuk menganalisa dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam menentukan formulasi Kebijakan kenaikan harga BBM terhadap masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan

Sebelum memahami implementasi kebijakan alangkah baiknya perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan itu sendiri. Dye sebagaimana yang dikutip Islamy (1992) mendefinisikan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik tersebut meliputi semua tindakan pemerintah dan bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Chandler dan Plano (Tangkilisan, 2003) bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Easton (Tangkilisan, 2003) mengungkapkan kebijakan publik adalah " sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan ini adalah (1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah, (3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, (4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam merupakan tindakan pemerintah mengenal segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk dilakukan sesuatu, (5) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa".

Pada dasarnya proses kebijakan merupakan proses sosial, atau lebih tepat lagi merupakan proses politik. Dikatakan proses sosial, ka-

rena proses kebijakan melibatkan berbagai unsur masyarakat baik selaku pelaku atau objek kebijakan dan proses itu sendiri banyak mempengaruhi perilaku dan perkembangan situasi masyarakat. Dikatakan proses politik karena pada pelaku dalam proses kebijakan menggunakan : kekuasaan yang dimiliki untuk mempengaruhi arah dari proses kebijakan. Selain itu, proses ini berlangsung dalam setting politik, administrasi dan sosial tertentu, dan merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan kehidupan bernegara (Wahab, 1999). Proses kebijakan secara berurutan terdiri dari :

- a. Penyusunan agenda kebijakan (Agenda Setting)
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Evaluasi kebijakan (Dunn, 1999).

Subsidi

Menurut Wijaya (1999) Subsidi adalah "Penetapan harga beli dibawah harga umum." Harga umum dalam hal ini dapat mengacu pada harga internasional atas komoditi yang sama atau ongkos produksi. Dengan demikian subsidi BBM dalam hal ini berarti penetapan harga BBM di bawah harga internasional atau ongkos produksi BBM. Karena selama ini BBM mendapat subsidi tentunya harga akan dibawah harga BBM dinegara yang tidak memberikan subsidi (inilah alasan mengapa di negara-negara ASEAN harga BBM Indonesia relatif lebih rendah).

Seperti sudah disebut sebelumnya, adanya harga BBM yang disubsidi pada umumnya akan diikuti dengan berbagai kerugian, antara lain; penyeludupan, penimbunan dan pengoblosan, distorsi pasar, pemborosan dan lain-lain. Sejahtera keuangan pemerintah memungkinkan berbagai kerugian tersebut masih dapat ditolerir karena sebenarnya pemberian subsidi mengandung juga unsur positif. Tetapi masalahnya adalah keuangan pemerintah untuk tahun-tahun mendatang akan mengalami masa-masa sulit.

Dasar penetapan harga BBM baru tahun 2003 adalah Keppres No. 90 tahun 2003. Berdasarkan pada Keppres ini maka harga BBM tidak lagi berdasarkan pada harga pasar tetapi berdasar pada harga patokan. Apakah arti harga patokan. Harga patokan adalah harga rata-rata satu bulan 100% harga pasar (MOPS+ 5 %). Sedangkan MOPS adalah (Mid oil Platt's Singapore) harga transaksi jual beli pada bursa minyak singapura. MOPS dalam hal ini bukanlah harga eceran BBM di Singapura pada SPBU atau tempat penjualan umum lainnya dimana dalam penjualan BBM tersebut telah ditambahkan margin perdagangan sejumlah tertentu baik untuk pajak maupun keuntungan. Dalam MOPS

belum terkandung unsur pajak pemerintah serta keuntungan yang diraih para pengusaha. Pada periode ini metoda yang digunakan disebut sebagai harga pasar dimana formulanya adalah $MOPS + 5\%$. Angka 5% dimasukkan kedalam perhitungan sebagai representasi dari penyusutan atas BBM selama distribusi. Tentunya angka ini harus makin besar manakala diketahui ternyata penyusutan selama distribusi jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Kalau penyusutan lebih besar dari yang diharapkan misal 15% maka penerimaan dari penjualan akan lebih rendah dari yang seharusnya. Untuk hal ini pemerintah harus menanggung selisih antara yang diterima aktual dengan yang seharusnya diterima.

Program Kompensasi

Adanya pengurangan subsidi BBM memberikan ruang gerak lebih luas kepada pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pemerintah yang ada, walaupun secara umum beban keuangan pemerintah semakin berat. Dalam kaitannya dengan subsidi BBM, Pemerintah memperkenalkan program yang disebut sebagai program kompensasi penghapusan subsidi BBM (PKPS BBM), dengan anggaran telah ditentukan didapat dari pengurangan subsidi BBM.

Di samping itu, pengurangan subsidi BBM oleh Pemerintah Pusat digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa 4 kebijakan, berupa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pembangunan infrastruktur desa. *Pertama*; Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana BOS kepada para pelajar yang kurang mampu. Dana tersebut, nantinya akan langsung disalurkan kepada rekening sekolah-sekolah yang akan mengelola dana BOS, sehingga tidak akan ada pungutan biaya terhadap para pelajar miskin. Kemudian, *Kedua*; Pemerintah Pusat memberikan bantuan kesehatan dalam bentuk pemberian obat-obatan gratis kepada masyarakat miskin. Selain mendapatkan obat-obatan, masyarakat miskin berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa dibebani biaya pengobatan oleh rumah sakit maupun Puskesmas. Selanjutnya, *Ketiga*; Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana BLT kepada masyarakat miskin sebesar Rp. 100.000,- perbulan yang pada saat pencairannya akan diberikan sekaligus untuk jatah 151.2 bulan. Kemudian, untuk kebijakan yang *keempat*; diberikan Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana pembangunan infrastruktur desa. Dalam bantuan ini, setiap desa yang dikategorikan miskin akan mendapatkan untuk melakukan pembangunan jembatan dan fasilitas lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut akan dibangun sendiri oleh masyarakat setempat se-

hingga dana yang diberikan akan dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut catatan Bappenas (2004), lebih dari 84 persen dana subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Sementara hanya sekitar 16 persen saja dari subsidi BBM tersebut, yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan termiskin. Padahal selama ini pemerintah menerapkan kebijakan memberikan subsidi BBM tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun ternyata di lapangan, harapan pemerintah tersebut tidak dapat terwujud dengan baik. Namun demikian pertanyaannya sekarang, apakah ada jaminan bahwa dengan dicabutnya subsidi BBM tersebut dapat mensejahterakan masyarakat miskin.

Keadaan ini akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dampak kenaikan harga BBM dalam negeri akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Namun demikian pemerintah bertekad untuk mempertahankan kesejahteraan sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama masyarakat miskin. Untuk itu pemerintah akan memberikan kompensasi dalam bentuk: Program kompensasi bidang pendidikan. Program kompensasi bidang kesehatan. Program pembangunan prasarana perdesaan. Program pemberian Subsidi Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin (Tim Koordinasi Pusat Pelaksanaan program Subsidi kompensasi, 2005).

3. METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pasir Sungai Mangkauk sebagai agregat halus
- Batu pecah ukuran $\frac{3}{4}$ sebagai agregat kasar-CA dan ukuran $\frac{3}{8}$ sebagai agregat kasar-MA serta abu batu sebagai filler yang merupakan produksi PT Jati Baru Quari Bentok, Desa Banyu Hirang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.
- Aspal produksi Shell sebagai Bahan pengikat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru

Untuk Kecamatan Pulau Laut Utara dengan luas daerah 159,3 km² dan terdiri atas 21 desa/kelurahan dengan total penduduk ± 74.217 Jiwa tahun 2006 dengan luas 159,3 Km², terdiri atas 21 Desa/kelurahan dengan total penduduk 74.217 jiwa tahun 2006. Jumlah nelayan yang terbanyak di Kotabaru di Kecamatan Pulau La-

ut Utara ± 2.026 rumah tangga Nelayan atau 30% dari 20 di Kecamatan Kab. Kotabaru. Untuk kapal motor perikanan laut sebanyak 2.036 unit yang terdiri dari ukuran kapal motor perikanan laut kurang dari 5 GT sebanyak 1.973 unit, antara 5-10 GT sebanyak 37 unit, antara 10-20 GT sebanyak 19 unit, dan M.T dan PTM sebanyak 7 unit.

Selain sebagai nelayan penduduk sebagai penambah sebanyak 66 rumah tangga luas area yang dimanfaatkan sebesar 161,2 Ha. Kolam ikan sebanyak 31 rumah tangga dengan luas area sebesar 31 Ha. Sektor kesehatan di kecamatan Pulau Laut Utara Sarana kesehatan di kecamatan pulau laut utara sekarang menunjukkan 1 puskesmas, 5 Puskesmas pembantu, dan 5 Klinik kesehatan keluarga berencana.

Untuk sektor transportasi panjang jalan provinsi berjumlah 17.543 Km dan panjang jalan kabupaten berjumlah 188.808 Km dengan kondisi permukaan jalan aspal sepanjang 119.351 Km dan krikil sepanjang 87.000 Km. Kemudian kondisi jalan dalam kategori baik sepanjang 83.533 Km, kategori sedang sepanjang 69.668, kategori rusak 38.655 Km, kategori rusak berat 14.495 Km. Kemudian banyaknya jumlah jembatan yang terdiri dari bangunan beton sebanyak 33 buah, besi 9 buah dan kayu 31 buah.

Temuan Penelitian

Survey ke daerah pesisir di Kecamatan Pulau Laut Utara yang khususnya di Desa rampa. Hal ini mayoritas penduduknya sebagai Nelayan. Informan sebanyak 60 orang yang terdiri RT 1, RT 2 dan RT.3. yang kemudian secara proporsional dimana masing-masing Rukun tetangga sebanyak 20 warga Nelayan yang pernah mendapatkan dana kompensasi BBM. Untuk teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling terutama informan yang menguasai permasalahan untuk dimintai keterangan. Dipilihnya daerah tersebut menurut peneliti karena mayoritas penduduknya adalah sebagai Nelayan. sehingga harapan data-data yang digali dan ditemukan benar-benar mempunyai keabsahan yang dapat dipercaya.

Setelah penyebaran angket, peneliti melakukan wawancara sebagai data tambahan/pendukung dengan berbagai pihak. Seperti dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Camat Pulau Laut Utara, Kepala desa, Ketua nelayan, Ketua Koperasi Nelayan, Ketua RT setempat, Tokoh masyarakat, Pemilik kapal nelayan dan Nelayan. wawancara sebagai sumber informasi tambahan menemukan beberapa komentar yang esensial, sehubungan dengan kehidupan masyarakat nelayan semenjak kenaikan BBM.

Kemudian peneliti juga melakukan observasi langsung Kelokasi penelitian untuk melihat secara riil kondisi yang terjadi di masyara-

kat nelayan di daerah pesisir pulau laut utara Kotabaru. Dengan observasi peneliti dapat melihat kegiatan perekonomian masyarakat Nelayan dan kendala-kendala yang dihadapi.

Dimensi Distribusi BBM

a. Pendapat Informan Mengenai Kelancaran Suplai BBM.

Dari hasil survey tersebut menunjukkan sebagian besar informan sebanyak 41,66% menyatakan Suplai BBM semenjak pasca kenaikan BBM dengan adanya pengurangan subsidi oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan adalah lancar.

b. Kegiatan Masyarakat Nelayan Semenjak Kenaikan BBM.

Sebanyak 53,34% menyatakan kegiatan masyarakat nelayan dalam melaut semenjak kenaikan BBM oleh pemerintah kurang lancar.

c. Pendapat Informan Tentang SPBU Dalam Memenuhi Kebutuhan Nelayan.

Sebanyak 51,67% menyatakan SPBU dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat nelayan dalam melaut adalah kurang tersedia.

d. Keberadaan BBM Oleh Nelayan Dalam Menangkap Ikan.

Sebanyak 100% informan yang menyatakan bahwa keberadaan BBM adalah sangat penting.

e. Usaha Masyarakat Nelayan Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM.

Hampir mayoritas informan penelitian 90,00 % menyatakan tindakan dalam mengatasi kenaikan harga BBM sehingga aktivitas melaut terus berjalan adalah mengurangi pemakaian BBM (Solar) dengan bahan bakar pengganti lain.

Dimensi Penghasilan/Pendapatan

a. Kondisi Perekonomian Rumah Tangga Nelayan Semenjak kenaikan BBM

Lebih sebagian besar informan penelitian menyatakan mengenai kondisi perekonomian rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama pangan dan sandang semenjak adanya kenaikan BBM masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah terbebani.

b. Keadaan Penghasilan Semenjak adanya kenaikan BBM

Sebesar 31,67 % menyatakan penghasilan/pendapatan tidak menentu dan 68,33% menyatakan adanya penurunan penghasilan. Hal ini menunjukkan penghasilan/pendapatan masyarakat nelayan semenjak kenaikan BBM lebih sebagian besar masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah menurun.

c. Rutinitas Melaut Sebagai Nelayan Semenjak Adanya kebijakan Pemerintah Tentang kenaikan BBM

Sebanyak 20,00% menyatakan tidak menentu, sebanyak 80,00% menyatakan berkurang. Hal ini menyatakan rutinitas masyarakat nelayan dalam melaut semenjak kenaikan BBM adalah kurang.

d. Kemampuan Menaikkan Harga Jual Hasil Tangkapan Nelayan

Sebagian besar (75 %) menyatakan telah menaikkan harga jual hasil tangkapan melaut adalah tidak.

e. Hasil Melaut Dalam Menutupi Kebutuhan Perekonomian atau Keuangan Rumah Tangga.

Hampir mayoritas (88,33%) menyatakan penjualan hasil laut oleh nelayan dalam menutupi kebutuhan perekonomian atau keuangan di rumah tangga semenjak adanya kenaikan harga BBM yang dirasakan oleh masyarakat nelayan adalah kurang terpenuhi.

f. Keinginan Dalam Mencari Pekerjaan Selain Nelayan

Sebagian besar (66,67%) menyatakan adanya keinginan untuk mencari pekerjaan selain sebagai nelayan semenjak kenaikan harga BBM yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Utara.

Dimensi Kompensasi BBM di Bidang Kesehatan.

a. Sosialisasi Pemerintah tentang Bantuan Biaya Kesehatan Secara Gratis

Sebagian besar (65,00%) menyatakan Sosialisasi oleh pemerintah tentang bantuan pelayanan kesehatan secara gratis semenjak adanya kebijakan kenaikan harga BBM yang dirasakan oleh masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah mengetahui.

b. Jaminan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Secara Gratis.

Hampir mayoritas (83,33%) menyatakan jaminan pemerintah kepada masyarakat Prasejahtera tentang pelayanan kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit umum milik pemerintah secara gratis dirasakan oleh masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah ya.

c. Pelayanan Pemerintah Mampu memberikan Kualitas Pelayanan Memuaskan.

Sebagian besar lebih (58,33%) informan penelitian menyatakan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Prasejahtera yang dirasakan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara semenjak adanya dana kompensasi BBM adalah cukup puas.

d. Prosedur Pelayanan Kesehatan Gratis Yang Ditetapkan

Sebagian besar (41,67%) menyatakan prosedur pelayanan kesehatan ditetapkan pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara semenjak adanya dana kompensasi BBM adalah mudah sekali hanya saja sebagian kecil pula yang umumnya berpendapat sulit.

e. Realisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Kompensasi Dana BBM Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis

Sebagian besar (75,00%) menyatakan mengenai realisasi kebijakan pemerintah tentang dana kompensasi BBM untuk memberikan pelayanan secara gratis adalah terwujud di kecamatan pulau laut utara.

Dimensi Kompensasi BBM Di Bidang Pendidikan

a. Sosialisasi Program Pemerintah Bidang Pelayanan Pendidikan Gratis

Sebagian besar (60,00%) menyatakan tentang program pemerintah bidang pelayanan pendidikan untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat prasejahtera yang dirasakan masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah mengetahui.

b. Realisasi Program Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis

Sebagian besar (53,33%) menyatakan tentang realisasi program pemerintah bidang pelayanan pendidikan untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat prasejahtera yang dirasakan masyarakat nelayan di kecamatan Pulau Laut Utara adalah dapat dirasakan meskipun sebagian kecil kurang merasakan program tersebut.

c. Transparansi Sekolah Dalam Program Bantuan Pendidikan.

Sebagian besar menyatakan tentang transparansi program bantuan pemerintah bidang pelayanan pendidikan untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat prasejahtera yang dirasakan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah terbuka.

d. Mekanisme Mendapatkan Beasiswa Pendidikan Melalui Pendidikan Gratis

Sebagian besar lebih (58,33%) menyatakan tentang mekanisme program bantuan beasiswa pemerintah bidang pelayanan pendidikan untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat prasejahtera yang dirasakan masyarakat nelayan adalah mudah.

e. Sasaran Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Prasejahtera

Sebagian besar lebih (53,33%) menyatakan tentang ketepatan sasaran program ban-

tuan beasiswa bidang pelayanan pendidikan kepada masyarakat nelayan prasejahtera di Kecamatan Pulau Laut Utara.

Dimensi Variabel Program Kompensasi Dana BBM Bantuan Langsung Tunai (BLT).

a. Dana kompensasi BBM Berupa Bantuan Tunai Langsung.

Sebagian besar lebih (61,67%) menyatakan tentang program dana kompensasi **BBM** berupa bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah sangat senang.

b. Realisasi Penyaluran Dana kompensasi BBM.

Sebagian besar (51,67%) menyatakan tentang realisasi program dana kompensasi BBM berupa bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah ragu-ragu.

c. Nilai Dana kompensasi BBM BLT Yang Diterima Sesuai Yang Ditetapkan

Sebagian besar lebih (58,33%) menyatakan tentang nilai dana kompensasi BBM bantuan tunai langsung (BLT) yang diterima masyarakat nelayan prasejahtera di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah sesuai.

d. Ketepatan Waktu Dalam Pemberian Dana Kompensasi BBM Bantuan Tunai Langsung (BTL)

Sebagian besar (55,00%) menyatakan tentang Pendapat informan mengenai ketepatan waktu dalam pemberian BBM bantuan tunai langsung (BLT) yang diterima oleh masyarakat nelayan prasejahtera adalah tepat waktu.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dimensi Variabel Distribusi BBM

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang dilihat dari dimensi variabel distribusi mengenai BBM seperti uraian berikut.

Pertama: Kelancaran suplai BBM terutama solar adalah *lancar-lancar* saja dalam arti tidak terlalu jadi masalah untuk solar yang umumnya digunakan nelayan.

Kedua: kegiatan masyarakat nelayan semenjak adanya kenaikan BBM oleh pemerintah mengalami hambatan di mana kegiatan nelayan menjadi *kurang lancar*. Hal ini disebabkan karena nelayan kesulitan dalam membelinya, karena harga BBM yang tinggi mengakibatkan biaya operasional melaut menjadi mahal, kalau dibandingkan dengan hasil laut yang tidak sebanding.

Ketiga: ketersediaan SPBU di Kecamatan Pulau Laut Utara menunjukkan masih *kurang tersedia*, padahal mayoritas sebagian penduduk daerah kabupaten Kotabaru adalah bermata pencaharian sebagai nelayan. Untuk Kecamatan

Pulau Laut Utara hampir 98 % adalah nelayan. Artinya banyak jumlah nelayan kiranya perlu dibangun SPBU yang dapat membantu.

Keempat: Untuk keberadaan BBM menurut nelayan penting sekali. BBM merupakan kebutuhan utama untuk melaut sekarang ini. Hanya saja kemampuan daya beli masyarakat untuk BBM (*solar*) terbatas.

Dimensi Penghasilan/Pendapatan

Pertama: Mengenai kondisi perekonomian rumah tangga nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara semenjak adanya kenaikan BBM terutama solar merasa berat. Padahal pemerintah dengan menaikkan BBM memberikan konsekuensi adanya pemberian subsidi yang dapat membantu dan mengurangi beban perekonomian masyarakat, dalam hal ini juga masyarakat nelayan prasejahtera yang selama ini subsidi BBM cenderung dirasa tidak adil karena dinikmati pula oleh masyarakat yang perekonomiannya mapan.

Kedua : Dilihat dari kondisi pendapatan/ penghasilan yang dirasakan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara justru semenjak adanya kenaikan BBM mengalami penurunan.

Ketiga : Sehubungan dengan permasalahan penurunan pendapatan yang dirasa oleh masyarakat nelayan, pada aspek ini adanya indikasi bahwa rutinitas dalam melaut berkurang.

Keempat: Kemudian ini menjadi aspek lain tentang adanya kemampuan para nelayan yang sulit menaikkan harga. Hal ini menjadi beban oleh para nelayan disaat kondisi sekarang.

Kelima : Untuk penjualan hasil laut oleh para nelayan dalam menutupi kebutuhan perekonomian dirasakan masih belum terpenuhi.

Keenam : Kemudian mengenai keinginan para nelayan untuk mencari pekerjaan lain adalah memang benar adanya, namun disisi lain ada juga yang tidak mampu berganti profesi sebagai nelayan

Dimensi Kompensasi BBM Bidang Kesehatan

Pertama : Program sosialisasi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah terutama dibidang pelayanan kesehatan secara gratis boleh dikatakan berhasil oleh karena pada umumnya mereka mengetahui program tersebut.

Kedua : Pemerintah telah memberikan secara konkrit jaminan pelayanan kesehatan yang telah dirasakan terutama masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara.

Ketiga : Mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terutama oleh Dinas Kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah sakit pada umumnya dirasakan sudah cukup puas.

Keempat : Mengenai prosedur pelayanan kesehatan yang ditentukan pemerintah dalam memberikan pelayanan gratis mempunyai pendapat yang bervariasi, akan tetapi pada umumnya penilaian nelayan mengenai prosedur pelayanan kesehatan secara gratis mudah sekali, apalagi pelayanan di Puskesmas, ketimbang di Rumah Sakit Umum.

Kelima : Mengenai realisasi kebijakan pemerintah tentang dana kompensasi BBM dalam memberikan pelayanan secara gratis adalah terwujud.

Dimensi Kompensasi BBM Di Bidang Pendidikan

Pertama : Dari hasil survey menunjukkan bahwa program sosialisasi pendidikan secara gratis kepada masyarakat prasejahtera yang dirasakan masyarakat nelayan di kecamatan Pulau Laut Utara adalah pada umumnya masyarakat Mengetahui.

Kedua : Hasil survey menunjukkan tentang realisasi program pemerintah bidang pelayanan pendidikan untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat prasejahtera adalah *dirasakan* masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara.

Ketiga : Mengenai transparansi program bantuan pemerintah bidang pelayanan pendidikan untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat prasejahtera yang dirasakan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah Terbuka.

Keempat: Mekanisme program bantuan beasiswa Pemerintah bidang pelayanan pendidikan untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat prasejahtera yang dirasakan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah mudah.

Kelima: Mengenai ketepatan sasaran pro-program bantuan beasiswa bidang pelayanan pendidikan kepada masyarakat nelayan prasejahtera di Kecamatan pulau Laut Utara adalah te-pat saja, meskipun demikian keadaan tersebut belum semuanya terpenuhi.

Dimensi Program Kompensasi Dana BBM Bantuan Tunai Langsung.

Pertama : Mengenai program dana bantuan kompensasi BBM berupa Bantuan tunai langsung yang terima masyarakat nelayan, pada umumnya mereka membutuhkan, akan tetapi akan lebih senang lagi menurut mereka apabila BBM diturunkan.

Kedua : Mengenai realisasi program dana kompensasi BBM berupa bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat nelayan prasejahtera di kecamatan pulau laut utara adalah ragu-ragu. Hal ini perlu dilihat tingkat keefektivan realisasi pembagian Dana bantuan kom-

pensasi BBM yang sarasannya adalah masyarakat prasejahtera. Keragu-raguan oleh masyarakat nelayan atas dana kompensasi BBM bantuan tunai langsung oleh karena masih menimbulkan kekecewaan dan kecemburuan masyarakat atas pembagian yang tidak merata.

Ketiga: Mengenai program bantuan kompensasi Dana BBM bantuan tunai langsung diterima masyarakat nelayan RP.300,000,- di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah sesuai saja. Hal ini berarti bahwa kredibilitas yang baik dan kesesuaian dengan apa yang telah ditetapkan.

Keempat : Mengenai ketepatan waktu dalam pemberian BBM bantuan tunai langsung (BLT) yang diterima oleh masyarakat nelayan prasejahtera adalah tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan bagian dari pelayanan prima oleh pemerintah, karena dana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kondisi perekonomiannya memprihatinkan. Program dana bantuan kompensasi BBM oleh pemerintah yang berbentuk bantuan tunai langsung (BLT) pada dasarnya baik mengenai aspek sosialisasi, realisasi, jumlah dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan BLT boleh dikatakan sukses, akan tetapi nilai tersebut masih dinilai kecil oleh masyarakat bila dihubungkan dengan kondisi sekarang. Kemudian hingga sekarang BLT masih ada yang belum, sehingga mengecewakan masyarakat setempat dan belum lagi ada warga masyarakat nelayan prasejahtera yang belum terdata. Yang jelas prosedur sudah bagus akan tetapi implementasinya masih ada kesimpangsiuran dan hingga sekarang belum ada dirasakan masyarakat tentang BLT, sehingga oleh masyarakat mempertanyakan tentang dana tersebut, bila tidak ada lagi program tersebut akan dana-dana BLT itu digunakan untuk apa. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan secara jelas dan konkrit mengenai keberlangsungan Dana Bantuan tunai langsung tersebut (BLT).

5. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama ; Distribusi BBM (Solar) untuk masyarakat nelayan di kecamatan pulau laut utara selama ini tidak ada masalah, hanya saja semenjak adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah, masyarakat nelayan terbebani dengan biaya operasional yang besar.

Kedua ; Terpukulnya Perekonomian rumah tangga masyarakat nelayan semenjak adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah.

Ketiga ; Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan

pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Untuk program ini telah dirasakan betul oleh masyarakat nelayan dikecamatan pulau laut utara didalam pelaksanaannya, baik sosialisasi, realisasinya, dan prosedurnya.

Keempat ; Program pendidikan secara gratis melalui dana bantuan kompensasi BBM memang sudah tercapai dan dirasakan masyarakat khususnya masyarakat nelayan prasejahtera dikecamatan Pulau laut utara. Untuk ditingkat Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah dirasakan oleh masyarakat, sedangkan ditingkat sekolah menengah atas masih kurang dirasakan, ditingkat ini pula banyak siswa yang akhirnya putus sekolah dan bekerja membantu perekonomian orang tuanya.

Kelima ; Dana bantuan kompensasi BBM berupa bantuan tunai langsung yang diterima sebesar Rp.300.000,-/tiga bulan oleh masyarakat nelayan prasejahtera pada realisasinya baik saja baik jumlah uang dan waktu pembagiannya yang diterima oleh masyarakat.

Keenam ; Program kompensasi penghapusan subsidi BBM (PKPS BBM) dengan anggaran yang telah ditentukan di dapat dari pengurangan subsidi BBM untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan.

Saran-saran

Pertama ; Upaya strategies yang perlu dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah suplai solar.

Kedua ; Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada setiap nelayan dalam aspek pendanaan pinjaman lunak atau berupa peralatan dan perlengkapan melaut yang diberikan kepada setiap nelayan untuk perkembangan usahanya.

Ketiga ; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara prima oleh birokrasi pelayanan kesehatan publik oleh rumah sakit pemerintah, agar terciptanya kredibilitas dan akuntabilitas terhadap publik.

Keempat ; Peran pemerintah dan pihak sekolah untuk bersama-sama memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Untuk ditingkat SMA hendaknya distribusinya bagi siswa tidak mampu harus benar-benar diperhatikan dan dipikirkan, oleh karena ditingkat ini siswa putus sekolah karena harus membantu perekonomian orang tuanya.

Kelima ; Program dana bantuan kompensasi BBM melalui bantuan tunai langsung perlu adanya penjelasan dari pemerintah, hingga sekarang ini ada masyarakat nelayan yang masih belum mendapatkan bantuan tunai langsung.

Keenam ; Pemerintah perlu kiranya membangun sarana dan prasarana pembangunan yang dibutuhkan masyarakat terutama persediaan sarana air bersih, listrik dan perbaikan serta pembangunan sarana jalan dan perairan laut.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul, Wahab, Solichin, (1997) : *Masa Depan Otonomi Daerah*, Edisi Satu, SIC
2. Adi, Wijaya, (1999) : Prospek perekonomian Indonesia tahun 2000, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta, P2E-LIPI.
3. Bappenas, (2004) : *Pencabutan Subsidi BBM dan Kesejahteraan Nelayan*, (September, 2007).
4. Dunn, W.N, (1994) : *Public Policy Analysis, An Introduction*, Second Edition, New Jersey, Prentice Hall.
5. Islamy, M. Irfan, (1994), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
6. Ladamay, Ode Siti Andini, (2012) : *Analisis Pengaruh Harga Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan Pesisir : sebuah Pendekatan Model Berbasis Dinamik*, ITS.
7. Lestari, esta, (2006) : *Dampak Pengurangan Subsidi BBM Terhadap Perekonomian Makro*, P2E-LIPI, Jakarta.
8. Moleong, Lexy J, (1990) : *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
9. Nugroho, Eko A, (2003) : *Dampak Pengurangan Subsidi BBM Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat*, P2E-LIPI, Jakarta.
10. Sugiyono, (2006) : *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2006
11. Suhana, (2005) : *Pencabutan Subsidi BBM dan Kesejahteraan Nelayan*, <http://www.google.go.id> (September, 2007).
12. Tangkilisan, Hesel N.S, (2003) : *Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik*, Cetakan 1, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
13. Tim sosialisasi Penghapusan Subsidi BBM, (2003) : Memahami sistem harga BBM, Makna Keppres No.90 tahun 2003. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Wahyu dkk, (2006) : *Pedoman Penulisan Tesis Magister Administrasi Publik*, Universitas Lambung Mangkurat Pustaka -Banua Banjarmasin, 2006.